

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF WISATA

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN INCLUSIVE TOURISM DEVELOPMENT

Hasan Ismail*, Eddy Wahyudi, Anggraeny Puspaningtyas

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Korespondensi email: hasanismaail@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pembangunan inklusif pada wisata Pantai Delegan Kabupaten Gresik, untuk mengetahui kolaborasi dalam pengembangan wisata pantai delegan, dan mengetahui pembangunan inklusif dalam pengembangan wisata pantai delegan di Kabupaten Gresik. Dewasa ini, pariwisata merupakan salah satu program utama pemerintah yang diharapkan dapat menjadi salah satu penghasil devisa yang sangat penting bagi pemerintah untuk mendukung keberhasilan pembangunan negara. Teori yang digunakan yakni *collaborative government* dan konsep pembangunan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian deskriptif, Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi literatur, informan pada penelitian ini yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik, pemerintah Desa Delegan, pengelola Pantai Delegan, masyarakat Desa Delegan dan wisatawan pantai Delegan. Pembangunan inklusif di Wisata Pantai Delegan sudah terbentuk, melalui keterlibatan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pembangunan wisata, namun inovasi pengembangan wisata masih kurang maksimal sehingga kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Dilihat dari kolaborasi pemerintahan yang berlangsung dalam pengembangan wisata Pantai Delegan, ada dominasi pemerintah desa selaku aktor yang memiliki kewenangan lebih banyak dalam pengelolaan wisata yang terjadi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan monitoring. Selain itu, belum ada keterlibatan sektor swasta, media dan akademisi dalam pengembangan wisata Pantai Delegan.

Kata Kunci: Pembangunan inklusif, *collaborative governance*, wisata pantai

ABSTRACT

This study aims to analyze collaborative governance in inclusive development on Delegan Beach tourism in Gresik Regency, to find collaboration and find inclusive development in Delegan Beach tourism development in Gresik Regency. The tourism industry is one of the government's flagship programs today which is projected to be one of the major foreign exchange earning sectors for the government in order to support the success of national development. The theory used is collaborative government and the concept of inclusive development. This study used a qualitative approach with descriptive research. Data collection was carried out by means of observation, interviews and literature studies. The informants in this study were the Culture and Tourism Office of Gresik Regency, Delegan Village government, Delegan Beach managers, Delegan Village people and Delegan Beach tourists. Inclusive development at Delegan Beach Tourism has been formed, through the involvement of the community, village government and local government in tourism development, but tourism development innovation is still not optimal so that tourist visits have decreased. Judging from the ongoing government collaboration in the development of Delegan Beach tourism, there is a dominance of the village government as an actor who has more authority in tourism management which occurs in decision making, management and monitoring. In addition, there has been no involvement of the private sector, media and academics in the development of Delegan Beach tourism.

Keywords: Inclusive development, *collaborative governance*, tourism beach

PENDAHULUAN

Industri pariwisata Indonesia merupakan industri yang berperan penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Jika pengelolaan yang baik dan benar tercapai, pengembangan pariwisata sebagai industri menciptakan peningkatan perputaran ekonomi melalui pengembangan transportasi, perumahan, dan konsumsi, yang menciptakan lapangan kerja relatif besar (Hadi & Al-Asy Ari, 2017). Secara geografis, Indonesia merupakan negara dengan alam yang indah, sehingga memiliki peluang yang baik dalam pengembangan industri pariwisata (Rusyidi & Fedryansah, 2019).

Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang didukung oleh berbagai sumber daya alam sehingga memiliki potensi yang dapat diandalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan peningkatan pembangunan nasional, termasuk di sektor pariwisata (Laili Khikmawati, 2022). Modal alam ini merupakan aspek fundamental yang dapat mendukung pengembangan industri pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan yang sangat kompleks yang dapat dilihat sebagai sistem besar yang terdiri dari ekonomi, ekologi, politik, sosial dan budaya. Sebagai suatu sistem pariwisata, analisis berbagai aspek pariwisata tidak dapat

dipisahkan dari subsistem lain seperti politik, ekonomi dan budaya dalam hal saling ketergantungan dan saling ketergantungan (Febriandini et al., 2019).

Industri pariwisata saat ini menjadi salah satu program utama pemerintah yang diharapkan dapat menjadi salah satu penghasil devisa yang sangat penting bagi pemerintah untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional (Salouw, 2021). Proses perencanaan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri pariwisata harus direncanakan secara matang, selain itu industri di sektor lain juga harus dikembangkan, misalnya dari industri kecil (rumah tangga) hingga industri besar (Bela & Utama, 2022). Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja serta kesempatan pendapatan, penguatan persatuan dan kesatuan, serta kebudayaan nasional. Berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 bahwa sarana pariwisata merupakan satu kesatuan unsur dan jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi yang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, Sumber daya manusia, peraturan dan mekanisme yang berkelanjutan untuk membawa perubahan untuk mencapai tujuan pariwisata. Pergerakan manusia kemudian menggerakkan rantai ekonomi yang saling terkait, menjadikan sektor jasa sebagai penyumbang penting bagi perekonomian masyarakat lokal (Sudirman et al., 2022).

Implikasi dari sistem desentralisasi memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mencari cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Fairuza, 2017). Daerah juga didorong untuk mengoptimalkan segala peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, salah satunya terkait dengan pengelolaan potensi wisata. Secara regional, Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan di pantai utara Jawa sebagai kawasan pendukung kota Surabaya dalam perkembangan industrialisasi manufaktur. Kabupaten Gresik juga memiliki alam yang sangat indah dan banyak peluang pengembangan sebagai industri pariwisata untuk meningkatkan nilai ekonomi. Keindahan alam Gresik, salah satunya kawasan wisata bahari. Pantai Dalegan merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Gresik yang cukup terkenal di kalangan warga Gresik dan sekitarnya. Pantai ini terletak di Desa Dalegan, Kecamatan

Panceng, Kabupaten Gresik. Pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Gresik Tahun 2013-2025. Pengembangan pariwisata daerah yang direncanakan meliputi; Pengembangan destinasi pariwisata daerah, pengembangan pemasaran pariwisata daerah, pengembangan sektor pariwisata daerah dan pengembangan sarana pariwisata daerah (Putri, 2015). Salah satu sasaran dari Perda ini adalah wisata pantai delegan yang berada di Desa Delegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Objek wisata Pemerintah Kabupaten Gresik meresmikan Pantai Dalegan sebagai tempat wisata pada tahun 2003 bertepatan dengan hari jadi Kota Gresik. Saat dibuka, masyarakat Desa Dalegan bergotong royong membangun secara mandiri, membuat dermaga sederhana yang menjorok ke laut untuk menarik wisatawan.

Kerjasama pembangunan yang direncanakan pemerintah desa dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik sebenarnya sudah berjalan, namun belum mencapai tujuan untuk memaksimalkan potensi wisata pantai Delegan. Ada beberapa aspek yang masih belum bisa dikembangkan sehingga objek wisata ini sehingga kurang diminati oleh warga Gresik, maupun luar daerah, Nur anis ekowati (pelaku usaha) menilai penurunan jumlah wisatawan di Pantai Delegan ini dikarenakan "...Tidak ada Inovasi objek wisata pendukung dan kebersihan di wilayah pantai masih belum terjaga dengan baik" secara tidak langsung mempengaruhi keberadaan objek wisata Pantai Delegan dibandingkan dengan wisata sejenis di daerah lain. Perkembangan pariwisata yang baik meningkatkan jumlah wisatawan, berpengaruh pada pertumbuhan pendapatan dan penjualan di sekitar destinasi wisata tumbuh. Faktor yang menjadi daya tarik wisatawan antara lain kesempurnaan infrastruktur, perencanaan konsep wisata dan kebersihan destinasi wisata.

Studi terkait pengembangan Wisata Pantai Delegan telah dilakukan oleh (Tamrin et al., 2022) yang fokus penelitiannya terkait modal sosial dalam tata Kelola wisata pesisir: Studi di Pantai Delegan Kabupaten Gresik Pasca Pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan pengembangan wilayah (pembiayaan, perijinan, pengembangan wisata pantai, dll) masih terbatas, yang merupakan masalah utama yang menghambat keberlanjutan pembangunan lokal di masyarakat. Maka dari itu, perlu dilakukan kerja sama dengan pemerintah dan dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pariwisata Kabupaten

Gresik untuk lebih mengembangkan dan mendukung masyarakat dalam pengembangan kawasan pantai Pantai Delegan di Kabupaten Gresik.

Permasalahan empiris dalam pengembangan wisata pantai Dalegan adalah permasalahan infrastruktur, kesempurnaan ruang publik, dan permasalahan pemasaran. Oleh karena itu, upaya pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir memerlukan kerjasama pembangunan kepariwisataan yang inklusif yang terintegrasi dalam model pembangunan kepariwisataan yang terencana dengan baik. Wegman & Wagner (2012) menjelaskan bahwa kerja sama merupakan prasyarat bagi pemerintah dan sektor swasta untuk memperjuangkan tujuan sosial bersama. Manajemen kolaboratif juga dapat menggambarkan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan untuk tata kelola kolaboratif muncul karena para aktor menyadari keterbatasan mereka. Kemudian aktor-aktor tersebut harus mengungkapkan keinginan dan kemauannya untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan aktor-lain.

Kerja sama adalah upaya dan tanggapan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Dalam menyelesaikan masalah publik ini, pemerintah harus bekerja sama dengan aktor non-negara seperti swasta, masyarakat dan lainnya (Bela & Utama, 2022). *Collaborative governance* didorong untuk menciptakan pembangunan ekonomi inklusif yang secara adil menciptakan peluang dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar kelompok dan wilayah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti bertujuan untuk meneliti terkait *collaborative governance* dalam pembangunan inklusif pada wisata pantai delegan Kabupaten Gresik, untuk mengetahui kolaborasi dalam pengembangan wisata pantai delegan, dan mengetahui pembangunan inklusif dalam pengembangan wisata pantai delegan di Kabupaten Gresik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mempelajari fenomena dan mengumpulkan informasi menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda selama periode waktu tertentu (Creswell, 2015). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut (Denzin & Lincoln, 2006) penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang menggambarkan keadaan suatu objek atau objek penelitian berdasarkan fakta sebagaimana adanya. dimana peneliti mempelajari fenomena dan kegiatan tertentu (program, peristiwa, proses kelembagaan atau kelompok sosial) dan mengumpulkan

informasi yang rinci dan komprehensif selama periode waktu tertentu dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda. Pada penelitian ini, Peneliti akan menggali dan mendeskripsikan kolaborasi dalam pembangunan inklusif wisata Pantai Delegan di Kabupaten Gresik.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan, informan dalam penelitian ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik, pemerintah Desa Delegan, pengelola Pantai Delegan, warga Desa Delegan dan wisatawan dari Pantai Delegan. Proses analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi data, reduksi data, abstraksi data, interpretasi data, dan pemeriksaan keabsahan data, hasil analisis kemudian dideskripsikan dari proposisi teoritis sesuai dengan teori yang digunakan (Neuman, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa pasca pandemi. Pada masa pandemi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,36% meningkat pada tahun 2021 sebesar 3,8% dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 5,52%. Seperti dapat dilihat pada gambar 1 berikut merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2020-2022.



Gambar 1. Tingkat Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2020-2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama ini ditopang dari 3 sektor utama yang banyak menyumbang pada pendapatan daerah yaitu sektor pertambangan dan penggalian, jasa keuangan dan asuransi; jasa lainnya. Pertumbuhan sektor pariwisata yang berada di dalam sektor jasa lainnya yang setiap tahun mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,36% naik di tahun 2021 sebesar 3,58% dan di tahun 2022 sebesar 4,44%.

Kontribusi sektor ekonomi Kabupaten Gresik dari struktur PDRB Tahun 2022, tertinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 27,17% dari seluruh total PDRB. Sektor terbesar kedua yaitu sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 8,33%. Sektor terbesar ketiga yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 6,02%. Terbesar keempat yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,75%. Terbesar kelima adalah sektor Konstruksi yaitu sebesar 5,32%. Terbesar keenam adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,05%. Terbesar ketujuh yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,75%. Sektor terbesar kedelapan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 4,63%. Sektor terbesar kesembilan yaitu sektor Jasa Lainnya sebesar 4,44%. Penerimaan sektor pariwisata masuk ke dalam sektor jasa lainnya yang merupakan penerimaan urutan ke Sembilan dari 17 sektor dalam struktur PDRB.



Gambar 2. Kontribusi Sektor Ekonomi dalam PDRB Tahun 2022

Sektor pariwisata di Kabupaten Gresik memberikan peluang kunjungan wisatawan yang sangat besar. Potensi wisata di Kabupaten Gresik sangat lengkap mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata religi, wisata budaya, dan wisata kuliner. Ada kurang lebih 40 obyek wisata yang dapat dikunjungi di Kabupaten Gresik, 10 terbesar diantaranya adalah Wisata Religi Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Maulana Ishak, Bukit Songgoriti, Pantai Delegan, Pulau Noko Selayar, Bukit Bintang, Pulau Bawean, Pantai Kuburan Panjang, Gunung Kapur Sekapuk. Namun dala kontribusi pedapatan potensi wisata ke dalam pendapatan asli daerah dan PDRB masih kurang optimal.

Jika dilihat dari sisi geografis dan demografis Kabupaten Gresik memiliki Potensi Wisata, salah satunya wisata pasir putih pantai delegan. Pantai Delegan merupakan salah satu objek wisata

berada di Desa Dalegan Kecamatan Panceng yang berupa pantai dengan luas sekitar 2,5 hektar, wisata Pantai dalegan merupakan satu-satunya objek wisata di Kabupaten Gresik dengan topografi pantai landai, ombak cukup tenang, dan berpasir putih. Potensi alam di Pantai Dalegan, yang notabene memiliki perairan ombak yang tenang. Hal ini membuat kawasan wisata pantai di wilayah utara pulau jawa ini menghadirkan kondisi dan situasi aman untuk digunakan berenang dan aktivitas keluarga dan anak-anak. Selain itu letak Pantai Delegan cukup strategis yaitu di sisi jalan utama pantai utara “Jl.Raya Daendels” yang menghubungkan pulau Jawa dari Jawa Timur sampai Ibu Kota Jakarta. Pantai Delegan berada di jalur wisata ziarah wali mulai dari Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Drajat di Lamongan hingga Sunan Bonang di Tuban. Namun Pembangunan kawasan wisata Pantai Delegan masih kurang optimal, berdasarkan pernyataan Mahfudi (Ketua pengelola Pantai Delegan) “Perkembangan pantai ini mengalami penurunan, antusiasme wisatawan mengalami penurunan, dibandingkan ketika awal wisata pantai delegan ini dibuka”. Selanjutnya Nur anis ekowati (pelaku usaha) menilai penurunan jumlah wisatawan di Pantai Delegan ini dikarenakan “...Tidak ada Inovasi objek wisata pendukung dan kebersihan di wilayah pantai masih belum terjaga dengan baik”. Dalam pengembangan wistaruang fisik adalah ruang yang disediakan oleh pengelola suatu destinasi wisata untuk memberikan pelayanan atau kesempatan bagi wisatawan untuk menikmatinya (Silayar, 2021). Karena ketersediaan pelayanan mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati destinasi wisata dalam waktu yang relatif lama. Fasilitas dan pelayanan tersebut memudahkan untuk mengetahui tempat wisata yang diinginkan dan berkeliling tempat wisata tersebut. dalam pengembangan pariwisata untuk daya tarik wisata dan menganalisis potensi apa saja yang dapat dikembangkan dan dikelola di daerah tujuan wisata (Indhawati & Widiyarta, 2022). Indikator destinasi wisata, apakah memenuhi tiga syarat yaitu, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dibeli di destinasi wisata yang dikunjungi (Gunadi & Rusli, 2022).

Pembangunan inklusif

Inklusif secara harfiah berarti "yang mencakup". Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang mempengaruhi semua orang. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan pembangunan inklusif sebagai pembangunan ekonomi yang mempengaruhi semua warga

negara. Pembangunan inklusif juga dapat dipahami sebagai pembangunan untuk semua, pembangunan tidak hanya untuk yang pintar, kaya dan mampu tetapi juga untuk yang kurang beruntung dan kurang mampu juga berhak menikmati manfaatnya pembangunan (Rusata et al., 2022) Mengungkapkan Kebijakan Internasional tentang Pertumbuhan Inklusif merupakan pembangunan yang dilakukan secara holistic yang memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam proses pertumbuhan (pengambilan keputusan) dan memastikan bahwa setiap orang mendapat manfaat dari pertumbuhan secara adil dan merata. (Lestari et al., 2022) berpendapat bahwa pembangunan inklusif adalah tentang pemerataan kesejahteraan dimana manfaat pembangunan dirasakan oleh semua orang. Pembangunan inklusif sangat dibutuhkan untuk menjamin hak-hak sipil, yaitu akses pelayanan publik yang sama bagi semua orang. (Shaleh, 2021) menegaskan bahwa pembangunan inklusif meliputi sebagai berikut:

- a).Peningkatan ekonomi merupakan unsur fokus yang ingin dicapai, tetapi bukan tujuan utama
- b).Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor dalam meningkatkan kesejahteraan.
- c).Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.
- d).Terbentuknya kesetaraan antara institusi ekonomi dan institusi sosial.

Pembangunan kepariwisataan tidak bisa hanya dijalankan oleh satu pihak saja. Apalagi jika objek wisata tersebut berada pada tingkat desa sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak yang terlibat (Hernimawati, Surya Dailiati, 2022). Berkaitan dengan pembangunan wisata pantai delegan, Pengelolaan Pantai Delegan dikelola oleh pemerintah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat Desa Delegan. Anggota pengelola terdiri dari perangkat desa dan BPD, dengan struktural pemerintahan desa berada di bawah kepala desa sehingga pelaporan pengelolaan langsung kepada kepala desa. Pengelolaan Pantai Delegan mulai dari bidang pengelolaan kawasan pantai, infrastruktur, dan perdagangan (kios dikelola oleh desa dengan sistem penyewaan). Pemerintah desa sebagai pengelola bertanggung jawab dalam pengelolaan termasuk operasionalnya pembangunan infrastruktur, pengembangan wahana objek wisata dan promosi, sedangkan operasional pembangunan diperoleh dari hasil penyewaan banana boat, penjualan tiket, parkir dan sebagainya. Pembagian retribusi tiket yaitu 20% ke pemerintah daerah dan 70% ke pengelolaan pantai.

Sejak beroperasi pada tahun 2003, perkembangan pantai ini mulai menurun karena bermun-

gulan wisata-wisata baru di sekitar Kabupaten Gresik. Ketika pantai Delegan baru dibuka untuk wisatawan, antusiasme wisatawan sangat banyak karena mereka mempunyai rasa ingin tahu tentang pantai tetapi lama kelamaan antusiasme wisatawan menurun. Padahal secara geografis, lokasinya strategis dari arah Surabaya, Mojokerto, dan Lamongan. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, beberapa faktor yang menjadi penghambat adalah terdapat keluhan dari objek wisata yang disediakan monoton dan tidak ada inovasi, kebersihan juga belum terjaga dengan baik, serta pengunjung mengeluhkan kurangnya tempat duduk yang tersedia. Dari sisi pertumbuhan ekonomi di sekitar Pantai Delegan adalah pedagang makanan dan minuman di sekitar pantai harus berjuang sendiri untuk mendapatkan pelanggan / pengunjung untuk kembali lagi di kemudian hari karena pengelola pantai kurang bisa menjual keunggulan pariwisata. Dari segi infrastruktur, Pantai Delegan masih belum terawat dengan baik. Walaupun tempat berjualan di sekitar pantai sudah terkoordinir dengan baik oleh paguyuban pedagang namun ada persaingan antar pedagang. Pedagang berharap ada pelatihan kewirausahaan dan pembuatan brand lokal yang dapat disematkan dan dijual di produk oleh-oleh kawasan Wisata Pantai Delegan. Banyak masyarakat lokal yang memiliki potensi menjahit, menyablon baju, memasarkan dan mempromosikan produk, mengelola website dan media sosial namun masih minim sekali pelatihan dan pemberdayaan dari pemerintah setempat.

Berkaitan dengan kompetitor Pantai Delegan, di Jawa Timur ada banyak wisata pantai utara jawa yang terbentang dari Surabaya, Gresik, Lamongan dan Tuban juga menawarkan wisata pantai. Pemerintah desa Delegan sejak tahun 2020, melalui kerjasama dengan Dinas Pariwisata Gresik untuk pengelolaan website, namun kendalanya adalah operator desa tidak aktif untuk memposting kegiatan dan event yang ada di pantai delegan melalui sosial media ataupun website. Selain itu, pemerintah desa bersama dengan lembaga masyarakat dan masyarakat juga memberikan dukungan dengan membangun kios-kios untuk jualan masyarakat setempat. Kerjasama pembangunan yang direncanakan pemerintah desa dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik sebenarnya sudah berjalan cukup baik, namun belum mencapai tujuan untuk memaksimalkan potensi wisata Pantai Delegan. Ada beberapa aspek yang masih belum bisa dikembangkan, sehingga tempat wisata ini kurang diminati di luar Gresik dan sekitarnya, karena beberapa hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi keberadaan tempat

wisata Pantai Delegan di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan tempat wisata lain yang lebih terkenal di Kabupaten Gresik. Dibutuhkan kerja yang kompeten dan kemauan yang kuat untuk menjadikan destinasi ini sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler. Tahap peremajaan kembali wisata pantai delegan perlu mempertimbangan pemanfaatan kawasan pariwisata, meningkatkan infrastruktur penunjang wisata, dan peningkatan inovasi objek wisata yang lebih atraktif serta diperlukannya perawatan fasilitas wisata yang sudah tersedia., sehingga dalam pembangunan wisata pantai delegan diperlukan modal yang cukup banyak sehingga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertimbangkan konsep pembangunan inklusif, dimana pembangunan dilakukan oleh semua pihak dan manfaat pembangunan ditujukan pada semua pihak. Selain itu pada setiap tahap pengembangan kepariwisataan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat proses pengembangan kepariwisataan agar dengan mudah mengidentifikasi program pembangunan suatu daerah atau negara yang berpotensi untuk dikembangkan.

Collaborative Governance

Varian dari teori kemitraan adalah kolaborasi dan kemitraan, yang dikembangkan (K. Comfort, 2021) dari hubungan multi-fungsi pelayanan publik. Aktor-aktor ini termasuk pemerintah dan administrasi publik, warga negara dan aktor sosial lainnya yang dikenal sebagai aktor lain. Banyak penelitian telah mengembangkan definisi *Governance*, tetapi definisi ini masih terbatas pada apa yang dilakukan pemerintah, tetapi masih belum komprehensif. Kolaborasi adalah platform yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kerjasama adalah suatu kondisi dimana pemerintah mengimplementasikan tujuan publik melalui kerjasama antara organisasi dan individu.

Menurut Ansell & Gash (2018), tata kelola kolaboratif adalah tata kelola yang dibangun dengan melibatkan entitas publik dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan formal yang digerakkan oleh konsensus, di mana peran dibagi untuk mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program publik, seperti properti publik. Dalam praktek administrasi saat ini kerjasama administrasi sangat diperlukan. (Fairuza, 2017) Ada beberapa alasan mengapa setiap departemen atau lembaga melakukan kerjasama. *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena adanya inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong kerjasama dan koordinasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi publik

(Rozikin et al., 2019). Manajemen kolaboratif muncul sebagai tanggapan atas kegagalan dan tingginya biaya penegakan dan politisasi peraturan (Ansell, Chris and Gash, 2008). Tata kelola kolaboratif adalah proses struktur jaringan multidisiplin (pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil) yang mencapai kesepakatan bersama, membuat keputusan bersama, mencapai konsensus melalui interaksi formal dan informal untuk menciptakan dan mengembangkan norma yang saling menguntungkan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, interaksi yang terjadi dalam kerjasama tersebut adalah sama, yaitu semua aktor memiliki status yang sama. Reformasi diperlukan dalam proses pengelolaan kolaboratif dengan menyatukan perspektif berbagai pemangku kepentingan, mendekatkan dengan masyarakat, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain,

Berdasarkan pendapat berbagai ahli, dapat diartikan bahwa tata kelola kolaboratif adalah cara untuk menanggapi keinginan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, dan untuk menanggapi keterbatasan sumber daya pemerintah yang tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. dengan tujuan memperoleh sumber daya untuk pembangunan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. (Ansell, Chris and Gash, 2008) mengemukakan bahwa Pengertian *Collaborative Governance*; “*a formal, consensus-based and consultative process in which one or more public agencies engage non-governmental stakeholders for the purpose of formulating or implementing public policy or managing public programs or assets. A government arrangement that involves directly in the collective decision-making process.* Menurut definisi tersebut, di mana lebih dari satu badan publik dan lembaga non-publik berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal dan konsensual, dan yang menggunakan penilaian dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan atau program atau program publik atau pengelolaan aset publik.

Kolaborasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi setiap pihak. Kolaborasi yang berhasil jika ada dialog antar stakeholder yang terlibat, mereka memiliki hak suara, diskusi atas kepentingan bersama, memiliki pemikiran terbuka, paham masing-masing tugas dan posisi, serta memiliki visi yang sama. Pemerintah desa bersama pengelola Wisata Pantai Delegan telah berupaya menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait, diantaranya Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik, Dinas Pendapatan Dae-

rah, dan Masyarakat. Pada proses kerjasama tersebut, peran swasta belum ada dan peran pemerintah daerah belum maksimal dalam pelaksanaan program di Wisata Pantai Delegan. Sesuai dengan tahapan proses pemerintahan kolaboratif ada tiga tahapan yang perlu diidentifikasi agar pelaksanaan pemerintahan kolaboratif dapat terlaksana dengan baik.

Pertama, proses kerjasama pemerintah, yaitu mengidentifikasi isu pengembangan pariwisata Delegan dan melihat peluang pengembangan pariwisata di Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Langkah pertama diawali dengan penentuan status pariwisata yang hasilnya menunjukkan masih kurangnya respon masyarakat terhadap keberadaan wisata Pantai Delegan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan kawasan wisata. Masyarakat setuju bahwa mereka perlu melatih pemandu wisata bagi masyarakat sekitar. Ditambah dengan tempat wisata yang kurang terawat baik dari segi infrastruktur, pengelolaan sampah, tata letak kios dan tempat parkir yang kurang luas. Sehingga menyebabkan kurangnya minat wisatawan yang akan berkunjung kembali. Dalam kerjasama tahap pertama dengan pemerintah, kriteria tertentu harus diperhatikan, yaitu kepercayaan di antara peserta dan aksesibilitas ke pemerintah. Jika ada pertemuan antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat), tentu akan ada kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan wisata Delegan beach resort. Padahal, pemerintah desa lebih banyak terlibat dalam pengelolaan Wisata Pantai Delegan. Pengambilan keputusan masih didominasi oleh perangkat desa dan kepala desa. Secara teori, arah kebijakan, program dan kegiatan disusun dengan pendekatan top-down dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Kedua dalam proses kolaboratif pemerintah adalah melakukan dialog antar pemangku kepentingan untuk menyikapi pengembangan wisata pesisir di Delegan. Dari hasil identifikasi proses dialog antar pemangku kepentingan, proses dialog antar pemangku kepentingan dilakukan ketika ada permasalahan dan keberatan wisatawan. Kegiatan atau program yang diadopsi pada saat dialog antar pemangku kepentingan, dapat dilihat bahwa kewenangan pengambilan keputusan untuk pengembangan Wisata Pantai Delegan didominasi oleh pemerintah desa. Secara umum, hambatan dialog pemangku kepentingan disebabkan tidak semua pemangku kepentingan terlibat dan pihak yang diundang tidak dapat menghadiri pertemuan atau forum. Lebih lanjut, koordinasi cenderung di-

putusan oleh perangkat desa yang berarti masyarakat dan beberapa pemangku kepentingan lainnya cenderung monoton, tidak memberikan masukan dan gagasan untuk pengembangan pariwisata. Dalam konsultasi dengan beberapa pemangku kepentingan tentang dialog pemangku kepentingan, solusinya adalah setiap pemangku kepentingan secara sadar menghadiri pertemuan dan setiap pemangku kepentingan bekerja sama dengan baik untuk keputusan yang tidak tumpang tindih dan dapat ditindaklanjuti. Ketepatan pengambilan keputusan, penyusunan program dan kegiatan akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengembangan wisata Pantai Delegan. Pada tahap kedua ini, kriteria tata kelola koperasi yang harus diperhatikan adalah kepercayaan antar peserta. Dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan tidak kohesif, pengelolaan didominasi oleh pemerintah desa, masih ada kecenderungan kewenangan diputuskan oleh satu pihak, pengambilan keputusan tidak melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, tidak ada pembagian kerja yang jelas, terbatasnya informasi dan aksesibilitas bagi non-anggota, pengelolaan keuangan kurangnya transparansi.

Langkah ketiga dalam proses tata kelola kolaboratif adalah rencana aksi kolaboratif untuk mengembangkan Wisata Pantai Delegan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing pemangku kepentingan, perencanaan kolaboratif berupa perencanaan inovasi terprogram yang sesuai dengan kondisi terkini dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Rencana ini dipandu oleh masalah lahan dan masukan dari wisatawan dan penduduk lokal tentang pengembangan Wisata Pantai Delegan. Selanjutnya menentukan evaluasi keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, mengatakan bahwa kerjasama yang terjalin selama ini berhasil karena semua stakeholder bekerja sama dengan baik dan semua stakeholder saling mendukung. Namun, ada pendapat yang berlawanan bahwa ada kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Pada tahap ini, kriteria tertentu harus dipenuhi, yaitu komitmen untuk tujuan bersama, kepercayaan di antara para peserta. Hal ini diwujudkan dalam komitmen dan kepercayaan masing-masing aktor di pemerintah desa untuk menghasilkan program pengembangan pariwisata. Namun, itu hanya diatur oleh pengelola pariwisata pemerintah desa terkait.

KESIMPULAN

Pembangunan inklusif di Wisata Pantai Delegan sudah terbentuk, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pembangunan wisata. Kebermanfaatan wisata sudah dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, namun inovasi pengembangan wisata masih kurang maksimal sehingga kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Dilihat dari kolaborasi pemerintahan yang berlangsung dalam pengembangan Wisata Pantai Delegan, ada dominasi aktor yang terjadi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan monitoring. Dominasi tersebut terjadi karena pemerintah desa selaku aktor yang memiliki kewenangan lebih banyak dalam pengelolaan wisata. Selain itu, belum ada keterlibatan sektor swasta, media dan akademisi dalam pengembangan wisata Pantai Delegan.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah desa dan stakeholder yang terlibat adalah lebih ditingkatkan koordinasi / dialog bersama dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Stakeholder yang dimaksud adalah Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta, serta pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu diperlukan tahap peremajaan kembali wisata pantai delegan dengan mempertimbangan pemanfaatan kawasan pariwisata, meningkatkan infrastruktur penunjang wisata, dan peningkatan inovasi objek wisata yang lebih atraktif serta diperlukannya perawatan fasilitas wisata yang sudah tersedia, sehingga dalam pembangunan wisata pantai delegan diperlukan modal yang cukup banyak sehingga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertimbangkan konsep pembangunan inklusif, dimana pembangunan dilakukan oleh semua pihak dan manfaat pembangunan ditujukan pada semua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ansell, Chris And Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research And Theory*, 18(4).
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2022). Model Collaborative Governance dalam Pembangunan Pariwisata Alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(4).
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Gramedia Pustaka Utama.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2006). *The Sage Handbook Of Qualitative Research*, 2nd Ed. Edited By Norman K. Denzin, And Yvonna S. Lincoln. *Library*, 28(August).
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume*, 5(3).
- Febriandini, A. P., Warsono, H., Azlansyah, S. S., & Sipayung, A. Z. (2019). Peran Stakeholder Dalam Pemberdayaan di Kampung Pelangi. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta Stia Mataram*, 5(1). <https://doi.org/10.32666/Tatasejuta.V5i1.47>
- Gunadi, A., & Rusli, Z. (2022). Implementasi Program Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 260. <https://doi.org/10.31258/Jkp.V13i3.8115>
- Hadi, F., & Al-Asy Ari, M. K. H. (2017). Kajian Potensi Dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah (Studi Di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Md*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/Jmd.2017.31-07>
- Hernimawati, Surya Dailiati, S. (2022). Pengelolaan Pembangunan Kepariwisata Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 163–169.
- Indhawati, A., & Widiyarta, A. (2022). Pengembangan Objek Wisata Lontar Sewu oleh Bumdesa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 152–157.
- Laili Khikmawati, S. H. (2022). Model Pengembangan Wisata Bahari Model Development Marine Tourism. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 413–420.
- Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches*. In *Pearson Education*.
- Putri, C. W. (2015). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pada Pengelolaan Pantai Delegan di Kabupaten. *Jurnal Ekonomi*, 1 (1).
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3). <https://doi.org/10.24198/Focus.V1i3.20490>
- Salouw, E. (2021). Implementasi Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 6(1). <https://doi.org/10.26905/Jpp.V6i1.5543>
- Silayar, K. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.53878/Jr.V6i2.155>
- Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & La Tarifu. (2022). Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi. *Indonesian Journal Of International Relations*, 6(1). <https://doi.org/10.32787/Ijir.V6i1.335>
- Tamrin, M. H., Muhafidin, D., Nurasa, H., & ... (2022). Modal Sosial Dalam Tata Kelola Wisata Pesisir: Studi Di Pantai Delegan Kabupaten Gresik Pasca Pandemi. *Aliansi: Jurnal Politik ...*, 2021(December 2021). <http://journal.unpad.ac.id/Aliansi/Article/View/41958>